



KEADAAN DAN PROBLEMATIKA EKONOMI RUMAH TANGGA (HOME ECONOMICS) INDONESIA

Ahmad Chafid Alwi¹
Hari Wahyono²

¹Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi-Pascasarjana Universitas Negeri Malang
(Ahmad Chafid Alwi) email: ahmadchafidalwi@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
(Hari Wahyono) email: hariwyn@gmail.com

Abstrak

Permasalahan ekonomi di Indonesia salah satunya bersumber pada permasalahan ekonomi rumah tangga. Fokus dalam melihat keadaan dan problematika ekonomi rumah tangga di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: (a) Manajemen keluarga. Dimana Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang khas dan berbeda setiap sukunya dan bahkan Indonesia masih memiliki masalah besar pada banyaknya pemukiman kumuh, (b) Sumber daya keluarga. Aset yang dimiliki keluarga Indonesia ada yang karena usahanya namun ada juga yang di dapat dari warisan orang tuanya dan di Indonesia diatur dalam dua sistem yang berbeda yaitu hukum kompilasi islam dan hukum barat (perdata). Dari segi pekerjaan dan karir di Indonesia memiliki 21 golongan pokok pekerjaan namun jumlah pengangguran juga masih sangat besar (c) Ketahanan pangan. Saat ini Indonesia masih jauh dari angka target Pola Pangan Harapan (PPH) dan (d) pendidikan ekonomi di sekolah dan dalam keluarga yang saat ini masih belum efektif dalam memberikan pendidikan ekonomi rumah tangga.

Kata Kunci: manajemen keluarga, sumber daya keluarga, ketahanan pangan, pendidikan ekonomi, ekonomi rumah tangga

Akhir-akhir ini masalah perekonomian di Indonesia semakin besar dan kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, pengangguran tinggi, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan masih banyak lagi. Sumber masalah-masalah ini muncul juga tidak lepas dari permasalahan ekonomi rumah tangga disetiap keluarga di Indonesia. Masalah tatanan dalam ekonomi rumah tangga di Indonesia berbeda

dengan ekonomi rumah tangga di negara-negara lain. Meskipun masalah ekonomi rumah tangga juga memiliki kesamaan dengan negara lain secara umum antara lain seperti dan Sedangkan perbedaan masalah ekonomi rumah tangga Indonesia dengan negara lain terletak pada pewarisan profesi, pewarisan aset rumah tangga dan pelaksanaan pembelajarannya di dalam



rumah tangga dan serta pengajarannya di sekolah.

Permasalahan diatas sejatinya sudah disampaikan oleh presiden Ir. Soekarno didepan kongres ikatan sarjana ekonomi indonesia (1979) bahwa “*negara kita masih berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, tetapi politik perekonomian di bawah teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu*”. Selanjutnya beliau juga menyampaikan “*politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman. Berbagai barang yang penting bagi kehidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang cina*”(Sri-Edi Swasono, 1981). Pernyataan ini sudah diucapkan 37 tahun yang lalu, dan sekarang sudah terbukti jelas di negara ini. Sehingga masalah ini mempengaruhi isi pendidikan ekonomi yang diajarkan pada peserta didik dikelas. Sampai saat ini standar isi pendidikan ekonomi di Indonesia masih mengadopsi standar pendidikan ekonomi liberal seperti Amerika

yang tertuang dalam *Voluntary National Content Standards In Economic* yang dikeluarkan oleh CEE (*Council For Economic Education*). Dalam pengajaran pendidikan ekonomi pun belum membekalkan kepada peserta didik untuk faham tentang ilmu ekonomi rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis memandang masalah ekonomi rumah tangga yang ada di Indonesia dari sudut pandang Ekonomi Pancasila. Agar dalam pembahasannya sesuai dengan ideologi dan ke-khas-an Indonesia.

METODE

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka, baik yang diambil secara kepustakaan konseptual maupun kepustakaan penelitian. Secara konseptual kajian ini didapat dari beberapa artikel dan makalah-makalah simposium sistem ekonomi Pancasila. Selain itu beberapa penelitian dari BPS dan

penelitian yang terdapat dalam jurnal gizi dan pangan. Setelah data-data tersebut terkumpul, penulis melakukan tiga aktivitas berdasarkan model Miles dan Huberman (dalam Sahid, R. 2011) diantaranya *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

PEMBAHASAN

1.1. Manajemen Keluarga

Dalam manajemen keluarga terdapat tiga hal yang paling umum yang setidaknya harus diketahui oleh setiap keluarga Indonesia. Diantaranya adalah kedudukan perorangan dalam keluarga dan melaksanakan perannya dengan benar, mengatur keuangan, dan tata kelola rumah.

1.1.1. Keluarga dan masyarakat

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya

masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Effendi, N. 2007). Secara ekonomi fungsi keluarga adalah mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang.

3.1.2. Manajemen keuangan

Dalam penelitian Jorgensen (2007) ditemukan “*students who were financially influenced by their parents had higher financial knowledge, attitude, and behavior scores.*” Hal menunjukkan betapa pentingnya wawasan literasi keuangan dalam rumah tangga. Namun disisi lain memang menuntut orang tua juga harus memiliki pemahaman literasi keuangan yang tinggi serta sikap yang bisa di contoh oleh anak-anak



mereka. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik keuangan anak misalnya tentang berhemat, menabung, melakukan pembayaran mandiri, mencari pekerjaan ringan untuk mendapat uang, bersedekah, dsb. Di Indonesia saat ini sebagian besar rumah tangga sudah mulai mengajarkan keuangan kepada anak-anak mereka. Hal ini nampak pada sebagian besar orang tua yang memiliki usaha perdagangan telah melibatkan anak mereka dalam usahanya dan kemudian memberi uang bulanan sebagai honor mereka atau hanya sekedar sebagai imbalan.

3.1.3. Tata Kelola Rumah

Berdasar pada pernyataan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dwityo Akoro Soeranto yang dipublikasikan oleh media

detik.com, saat ini pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.000 hektar di perkotaan atau setara 10% dari total kawasan pemukiman (Pratama, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa ketidak mampuan rumah tangga dalam menyediakan tempat tinggal yang layak masih kurang. Hal ini ditandai dengan pemilihan rumah yang sebagian besar pada daerah yang sudah padat dan rapat penduduk, drainase yang kurang, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

3.2. Sumber Daya Keluarga

Keluarga ibarat sebuah negara kecil dimana terdapat pemimpin yang disebut kepala keluarga. Dimana didalamnya juga melakukan kegiatan ekonomi pokok yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Keluarga menggunakan segala sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sumber daya tersebut diantaranya adalah:

3.2.1. Aset keluarga



Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu pihak baik berupa aset tetap maupun aset lancar. Di Indonesia, aset yang dimiliki masyarakat dapat berupa aset yang didapat dari hasil sektor usaha yang dijalankan atau karena mendapat warisan dari orang tuanya.

3.2.2. Pewarisan aset

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper* (PwC) yang melakukan survei mengenai bisnis keluarga di Indonesia yang kemudian dipublikasikan oleh CNN menunjukkan bahwa lebih dari 95% perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga. Berdasarkan catatan PwC terdapat lebih dari 40 ribu orang kaya di Indonesia atau sekitar 0,2 persen dari total populasi yang menjalankan bisnis keluarga. Total kekayaan mereka mencapai Rp 134 triliun atau menguasai sekitar 25 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Supriadi, A. 2014).

Di Indonesia pewarisan aset diatur dalam dua hukum. Pertama hukum waris islam, dalam hukum ini pembagian warisan dilaksanakan sesuai syariat islam. Kedua, hukum waris perdata. Pada hukum ini menganut sistem individual. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai kedua hukum tersebut.

3.2.2.1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal (Kurniawan, W. 2012: 41). Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- a. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia



dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

b. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.

c. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan:

- Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, paman, dll.

- Hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri. Pernikahan itu harus memenuhi dua syarat:

- Perkawinan sah menurut syariat islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

- Saat terjadi pewarisan salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

- Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi maka hartanya akan diserahkan kepada baitul Mal



(perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat islam.

3.2.2.2. Hukum Waris

Perdata

Hukum waris perdata / hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua

cara untuk mewariskan:

a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instantato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:

- Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya
- Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya
- Golongan III terdiri dari kakek, nenek



- serta seterusnya ke atas
- Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya
- b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.

Dari kondisi di atas jika tidak dipahami seluruh masyarakat Indonesia ternyata memunculkan beberapa masalah yang selama ini dialami oleh masyarakat Indonesia yakni memicu permasalahan keretakan hubungan keluarga, bahkan bisa sampai akibat waris ini terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan.

3.2.3. Pekerjaan dan karir

Berdasarkan pengelompokan oleh BPS dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia 2015, lapangan usaha di



Indonesia digolongkan menjadi 21 golongan pokok antara lain:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
- e. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- h. Pengangkutan dan pergudangan
- i. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
- j. Informasi dan komunikasi
- k. Aktivitas keuangan dan asuransi
- l. Real estate
- m. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis
- n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjuang usaha lainnya
- o. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- p. Pendidikan
- q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial
- r. Kesenian, hiburan dan rekreasi
- s. Aktivitas jasa lainnya
- t. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja: aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan sendiri
- u. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.



Meskipun di Indonesia terdapat beragam jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ternyata masih belum dapat menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 5,94% dan tingkat pengangguran angkatan kerja mencapai 66,6%.

3.2.4. Pewarisan pekerjaan

Dengan diwariskannya aset keluarga maka juga terjadi pewarisan profesi yang terdapat dalam bisnis keluarga. Mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga pebisnis kelas atas, para orang tua selalu mengenalkan dan bahkan mengajarkan berbagai profesi yang mereka geluti. Para petani selalu mengenalkan profesi orang tuanya sejak anaknya masih kecil. Misalkan di ajak ke ladang mulai dari sekedar bermain hingga mengajarkan

anak mereka bagaimana “menggarap” ladang mereka. Para nelayan juga selalu mengakrabkan anak-anak mereka dengan perahu, laut dan kegiatan penjarangan ikan. Demikian pula terjadi kepada pebisnis kelas atas di Indonesia dimana mereka selalu membekali anak mereka dengan pendidikan tinggi dengan harapan akan menjadi penerus bisnis keluarga.

Keadaan ini memberikan tantangan masing-masing terhadap berbagai profesi orang tua. Seperti mengenai perekrutan karyawan, yaitu bagaimana menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Sehingga memberikan tantangan bagi para ahli waris dalam meningkatkan profesionalisme bisnis.

3.3. Ketahanan Pangan

Ukuran pemenuhan kualitas nutrisi pangan di Indonesia dilihat berdasarkan Pola Pangan harapan (PPH) dan persentase angka

kecukupan gizi (AKG). Pada tubuh manusia setidaknya harus mencukupi kebutuhan energi 2000kcal/kap/hari dimana 50% didapat dari padi-padian, 6% umbi-umbian, 12% pangan hewani, 10% minyak dan lemak, 3% buah/biji berminyak, 5% kacang-kacangan, 5% gula, 6% sayur dan lain-lain sampai 3% (Badan Ketahanan Pangan Kemernterian Pertanian RI, 2013: 29). Keadaan Indonesia saat ini berdasarkan beberapa penelitian-penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Konsumsi pangan dan gizi serta skor PPH di Indonesia

Usia	Hasil penelitian	Peneliti
2-6 tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengonsumsi padi-padian (99.4%) dan paling sedikit mengonsumsi buah/biji berminyak (1.6%). Anak mengalami defisit zat gizi makro lemak, energi, dan air serta defisit zat gizi mikro berupa	Teguh Jati Prasetyo, Hardinsyah, dan Tiurma Sinaga (2013)

	kalsium, vitamin A, vitamin B9, dan vitamin C.	
7-12 tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah mengonsumsi padi-padian (99.5%) dan sebagian kecil mengonsumsi buah/biji berminyak (1.9%). Sebagian besar anak usia sekolah (lebih dari 50.0%) mengalami defisit energi, lemak, karbohidrat, air, vitamin A, vitamin B1, vitamin B9, vitamin C, kalsium, fosfor, dan zink.	Karina Indah Pertiwi, Hardinsyah, dan Karina Rahmadia Ekawidyan (2014)



NCEE 2016

19-49 tahun	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelompok padi-padian dikonsumsi terbesar (99.4%), sedangkan biji berminyak dikonsumsi terkecil (2.0%).	Khoirul Anwar dan Hardinsyah (2014)
-------------	---	-------------------------------------

Keterangan: data tersebut dilakukan dengan pengambilan sampel pada 33 provinsi di Indonesia

Melihat dari keadaan Indonesia saat ini seperti data diatas, permasalahan utama berada pada ketidak pahaman masyarakat akan kebutuhan gizi dan nutrisi yang diperlukannya dalam beraktivitas. Padahal ini seharusnya terpenuhi dalam konsumsi rumah tangga setiap harinya. Permasalahan ini juga dapat muncul karena kemampuan sebagian besar masyarakat yang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan yang disebabkan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi.

3.4. Pendidikan ekonomi di dalam rumah tangga

Karena menggunakan sudut pandang ekonomi pancasila, maka penulis akan melihat pendidikan ekonomi berdasarkan ketiga semboyan pendidikan Indonesia yaitu, yaitu *Ing ngarsa sung tuladha*, *Ing madya mangun karsa*, dan *Tutwuri handayani*. Semboyan tersebut menjadi karakter pendidikan di Indonesia (Idris, 1982: 25).

3.4.1. *Ing ngarso sung tulodo*

Ing ngarsa sung tulada, jika dilihat secara tata bahasa memiliki dua susun kata yaitu *ing ngarsa* dan *sung tulada*. *Ing ngarsa* memiliki arti yang lebih berpengatuhuan, sedangkan *sung tulada* memiliki arti yang menjadi contoh. Jika kedua makna ini digabung berarti “yang lebih berpengetahuan yang memberi contoh. Hal seperti ini nampak ketika orang tua mengenalkan profesi mereka kepada anak-anaknya, mengajak mereka ketempat orang tua mereka bekerja, dan bahkan tidak sedikit anak Indonesia yang menggunakan



pakaian kerja orang tua mereka, meski terlihat terlalu besar pakaiannya namun memberikan rasa bangga bagi anak jika mereka menjadi seperti orang tua mereka.

3.4.2. *Ing madya mangun karsa*

Ing madya mangun karsa, juga tersusun dari dua suku kata. *Mangun karsa* memiliki makna membina kehendak untuk mengabdikan diri kepada cita-cita luhur. *Ing madya* berarti di tengah-tengah sehingga jika digabung *ing madya mangun karsa* akan memiliki arti pamong atau pendidik hendaknya mampu menumbuhkembangkan minat, hasrat dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Misalnya sebagian besar orang tua di Indonesia, ketika anak mereka mulai tumbuh dewasa, mereka melibatkan anak mereka dalam profesi mereka. Seperti petani yang mengajak anak mereka bercocok tanam

diladang, nelayan yang mengajak anak mereka melaut dan lain sebagainya.

3.4.3. *Tutwuri handayani*

Tut wuri handayani. *Tutwuri* berarti mengikuti dari belakang. *handayani* berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. hal yang seperti ini akan terlihat saat orang tua mulai sudah tidak mampu melanjutkan profesi mereka dan kemudian mewariskan profesi mereka kepada anak-anaknya.

Belum adanya standar pendidikan literasi ekonomi rumah tangga yang benar baik yang diajarkan didalam pendidikan formal maupun kurikulum khusus bagi orang tua dalam menyelenggarakan pendidikan ekonomi di dunia informal menjadikan beragam permasalahan ekonomi rumah



NCEE 2016

tangga di Indonesia belum terkondisikan dengan benar.

Meskipun sudah menjadi ciri khas pendidikan Indonesia dengan adanya semboyan tersebut nyatanya tidak semua pendidikan telah menerapkannya. Khususnya pendidikan yang ada di dalam sebuah keluarga. Beberapa keluarga masih sangat beragam pola pendidikannya.

3.5. Peran pendidikan formal dalam *home economic*

Saat ini dalam kurikulum pendidikan baik dalam mata pelajaran IPS di SD dan SMP serta Ekonomi di SMA belum membahas ekonomi keluarga misalkan dalam mengatur keuangan pribadi, masalah konsumerisme, sumber daya keluarga dan lain sebagainya. Pada jenjang sekolah dasar, materi IPS berupa tematik yang berisikan pekerjaan, jenis pekerjaan, barang dan jasa dan pekerjaan orang tua. Pada jenjang pendidikan SMA juga masih hanya sekedar pengkajian konsep tanpa ada makna dari pendidikan ekonomi yang bisa

digunakan langsung di rumah yang bisa mempengaruhi kehidupan peserta didik. maka sebenarnya yang dibutuhkan saat ini dalam pendidikan ekonomi adalah kajian ekonomi rumah tangga (*home economic*) yang akan menjadikan peserta didik lebih melek ekonomi dan mandiri. Mengingat permasalahan *home economic* tidak hanya menyangkut orang tua tetapi juga anak-anak, maka pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini.

4. Penutup

Berdasarkan keadaan dan problematika yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa alternatif dalam menyelesaikan problematika tersebut diantaranya: *pertama*, dilakukannya penelitian lebih mendalam kembali guna didapatkannya model pendidikan ekonomi rumah tangga yang sesuai dengan karakter keluarga di Indonesia. Jika model ini sudah terbentuk maka dapat dijadikan sebuah aktifitas transfer informasi



NCEE 2016

yang dapat diberikan kepada calon keluarga yang dikelola oleh Kementerian Urusan Agama sebagai bekal calon keluarga sebelum menikah. Selain itu juga harus diberikan dijenjang pendidikan formal. Model ini diajarkan sebagai pengantar ilmu ekonomi yang diajarkan di sekolah mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Kedua, mengenai pembagian warisan hendaknya benar-benar dalam pengawasan dan tata laksana hukum perdata. Sehingga dapat mengurangi pertentangan perebutan harta warisan., tindak kriminal, dan akan mampu meningkatkan keutuhan hubungan keluarga.

Ketiga, dalam pembelajaran ekonomi rumah tangga harus mempertahankan filosofi semboyan *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Karena bagaimana pun juga pendidikan ini menjadi karakteristik pendidikan di Indonesia yang membedakan pendidikan Indonesia dengan negara lain.

Daftar Rujukan

- Anwar, K dan Hardiansyah. 2014. *Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta Skor Pola Pangan Harapan Pada Dewasa Usia 19-49 Tahun Di Indonesia*. Jurnal Gizi dan Pangan, maret 2014, 9(1): 51-58.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2013. *Roadmad Diversifikasi Pangan 2011-2015*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Effendi, N. 2007. *Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : EGC
- Husaini, M. 2012. *Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Barito Putera*. Jurnal Agribisnis Perdesaan. Volume 02 Nomor 04 Desember 2012.



- Idris, Z. 1982. *Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa
- Jorgensen, B.L. 2007. *Financial Literacy of College Student: Parental and Peer Influences*. Thesis Master of Sains in Human Development. Virginia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ke satu. 1984. STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23. (online) (sumber: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf)
- Kurniawan, W. 2012. *Reformasi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Makalah dipublikasikan di wordpress. (online) (sumber: <https://lembarannalar.files.wordpress.com/2012/09/reformasi-hukum-kewarisan.pdf>)
- Pertiwi, K.I; Hardiansyah; dan Ekawidyani, K.R. 2014. *Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta Skor Pola Pangan Harapan Pada Dewasa Usia 7-12 Tahun Di Indonesia*. Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2014, 9(2): 117-124
- Prasetyo, T.J.; Hardiansyah; dan Sinaga T. 2013. *Konsumsi Pangan Dan Gizi Serta Skor Pola Pangan Harapan Pada Dewasa Usia 2-6 Tahun Di Indonesia*. Jurnal Gizi dan Pangan, November 2013, 8(3): 159-166
- Sahid, R. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman*, (online), (<http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html>)
- Sri-Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Dalam A. Majid dan S.E. Swasono (Eds.), Makalah-makalah yang diajukan dalam simposium sistem ekonomi pancasila (hlm. 1-29). Jakarta: Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
- Supriadi, A. 2012. *PwC: 95 Persen Perusahaan Indonesia Adalah Bisnis Keluarga*. CNN Indonesia. (online) (sumber: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141202100356-92-15176/pwc-95-persen-perusahaan-indonesia-adalah-bisnis-keluarga/>)